

**Megatrikania Kendali**  
Analisis Legislatif Ahli Pertama  
[megatrikania.kendali@dpr.go.id](mailto:megatrikania.kendali@dpr.go.id)

**Masyitah Aulia Ahiem**  
Analisis Legislatif Ahli Muda  
[masyitah.adhiem@dpr.go.id](mailto:masyitah.adhiem@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Pemerintah terus mendorong program hilirisasi sebagai strategi untuk meningkatkan nilai tambah sektor kelautan dan perikanan serta memperkuat daya saing produk nasional. Dari 28 komoditas yang menjadi prioritas hilirisasi, enam di antaranya berasal dari sektor ini, yakni udang, ikan tuna, tongkol dan cakalang (TTC), rajungan, tilapia, serta rumput laut dan lahan garam. Program ini dirancang untuk periode 2024–2029 dengan tujuan mempercepat pertumbuhan industri pengolahan dan meningkatkan kontribusi sektor perikanan terhadap ekonomi nasional. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menegaskan bahwa langkah ini sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen.

Sebagai langkah konkret, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menginisiasi sinergi lintas sektor melalui pengembangan kawasan hilirisasi hasil kelautan dan perikanan. Kawasan ini akan menjadi pusat pengelolaan hasil perikanan, baik dari perikanan tangkap maupun budi daya, serta mencakup aspek pengolahan, distribusi, dan pemasaran. Selain meningkatkan efisiensi industri, kawasan ini diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pemerataan ekonomi di wilayah pesisir. Saat ini, KKP tengah merumuskan kebijakan penetapan lokasi kawasan hilirisasi berdasarkan potensi unggulan dan karakteristik wilayah guna mendukung pengembangan industri perikanan yang berkelanjutan.

Dukungan terhadap hilirisasi sektor kelautan dan perikanan juga datang dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). BKPM telah menyusun peta jalan investasi (*blueprint* investasi) yang mencakup rencana kebutuhan investasi sektor ini berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) dari Kementerian Perindustrian. Langkah ini bertujuan untuk menarik lebih banyak investasi dalam pengolahan hasil perikanan serta memperkuat infrastruktur dan teknologi yang diperlukan untuk mendukung hilirisasi.

Selain itu, Kementerian Perindustrian turut berperan aktif dalam mendukung pengembangan kawasan industri tematik berbasis perikanan. Direktur Jenderal Industri Agro, Putu Juli Ardika, menyatakan bahwa kawasan industri ini akan mendapatkan berbagai insentif fiskal, termasuk insentif perpajakan dan kepabeanan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri. Dengan adanya insentif ini, diharapkan investasi di sektor pengolahan perikanan makin meningkat, mempercepat pengembangan industri hilir, dan mendorong ekspor produk perikanan bernilai tambah tinggi.

Upaya hilirisasi sektor kelautan dan perikanan masih menghadapi sejumlah tantangan. *Pertama*, infrastruktur yang belum optimal menjadi kendala utama dalam pengembangan industri hilir. Fasilitas pengolahan yang belum merata serta keterbatasan akses transportasi dapat menghambat distribusi produk perikanan. *Kedua*, keterbatasan teknologi pengolahan masih menjadi tantangan bagi industri perikanan. Banyak unit usaha perikanan yang masih mengandalkan metode pengolahan tradisional, sehingga hasil produksinya belum mampu bersaing di pasar internasional. *Ketiga*, minimnya sumber daya manusia yang terampil dalam

industri pengolahan perikanan. *Keempat*, aspek keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya perikanan juga menjadi tantangan yang harus diperhatikan. Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan sinergi antara pemerintah, industri, dan akademisi dalam mengembangkan teknologi pengolahan, memperkuat riset dan inovasi, serta meningkatkan keterampilan tenaga kerja di sektor perikanan. Selain itu, Pemerintah juga perlu memastikan bahwa kebijakan yang diambil sejalan dengan prinsip keberlanjutan sumber daya alam.

## Atensi DPR

Melalui fungsi anggaran, Komisi IV DPR RI berperan dalam memastikan alokasi dana yang memadai untuk mendukung hilirisasi sektor kelautan dan perikanan. Dana ini harus dialokasikan secara efektif guna memperkuat infrastruktur, meningkatkan kapasitas SDM, serta mengembangkan riset dan inovasi dalam industri perikanan. Sementara melalui fungsi pengawasan, Komisi IV DPR RI bertugas memastikan kebijakan pengembangan kawasan hilirisasi hasil kelautan dan perikanan berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku serta memberikan manfaat bagi masyarakat dan pelaku usaha perikanan. Dengan penguatan fungsi anggaran dan pengawasan, Komisi IV DPR RI dapat berkontribusi dalam menciptakan ekosistem industri perikanan yang lebih maju dan berdaya saing.

## Sumber

antara.com, 4 Maret 2025;  
kkp.go.id, 3 Maret 2025;  
kompas.co.id, 3 November 2024;  
wartaekonomi.co.id, 4 Maret 2025.

Minggu ke-1 Maret  
(3 s.d. 9 Maret 2025)



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

## EDITOR

### Polhukam

Ahmad Budiman  
Prayudi  
Rachmi Suprihartanti S.  
Novianti

### Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.  
Mandala Harefa  
Ari Muliarta Ginting  
Eka Budiyantri  
Venti Eka Satya  
Teddy Prasetiawan

### Kesra

Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola  
Yulia Indahri

## LAYOUTER

Devindra Ramkas O.  
Ully Ngesti Pratiwi  
Desty Bulandari  
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.  
Ulayya Sarfina  
Yosephus Mainake  
M. Z. Emir Zanggi  
Muhammad Insan F.  
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.  
Nur Sholikah P. S.  
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka\_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament  
Evidence Based Policy Making*